



DASAR HUKUM PELAYANAN KELURAHAN SAMBUTAN

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;**
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;**
- 3. Undang undang pokok Agraria Nomor 4 Tahun 1979;**
- 4. PP Nomor 37 tahun 1998 tentang PPAT;**
- 5. PP Nomor 73 tentang Kelurahan;**
- 6. PP No.26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK;**
- 7. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;**
- 8. Per.Men.Pan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;**
- 9. Per.Men.Pan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Publik;**
- 10. Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;**
- 11. Perwali Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.**